

ABSTRAK

AGUNG R. KURNIAWAN. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal (DAK SPDT) Tahun 2010-2012 di Kabupaten Situbondo.*

Dana Alokasi Khusus Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah Tertinggal (DAK SPDT) merupakan salah satu bidang DAK yang bertujuan untuk membantu daerah tertinggal, mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah menugaskan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengelola DAK SPDT sesuai dengan bidangnya. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu SKPD yang memiliki peran yang penting karena merupakan pengelola kegiatan transportasi dalam DAK SPDT di Kabupaten Situbondo.

Penelitian ini mengupas secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan DAK SPDT yang dilihat dari beberapa variabel yaitu: kompetensi sumber daya manusia, kelembagaan, tata kelola pemerintahan, dan Implementasi Kebijakan DAK SPDT.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda untuk mengukur seberapa besar variabel-variabel kompetensi sumber daya manusia, kelembagaan, tata kelola pemerintahan dapat menjelaskan variabel dependen (Implementasi Kebijakan DAK SPDT). Uji hipotesis dilakukan dengan t-test untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Sedangkan untuk menguji variabel independen secara simultan digunakan F-test. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dengan sampel sebanyak 100 orang responden.

Nilai koefisien determinasi (R square) yang diperoleh yaitu sebesar 0,804 (atau sebesar 80,4%) mencerminkan variasi perubahan pada variabel implementasi kebijakan pengelolaan DAK SPDT dapat ditentukan/dideterminasikan oleh semua variabel secara simultan sebesar 80,4%, dan sisanya yaitu sebesar 19,6% merupakan determinasi dari dimensi lain yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari kompetensi sumber daya manusia terhadap implementasi kebijakan pengelolaan DAK SPDT bernilai 0,98, dimana nilai p-value (sig) bernilai 1,764, terdapat pengaruh yang signifikan dari kelembagaan terhadap implementasi kebijakan pengelolaan DAK SPDT sebesar 0,924, dimana nilai p-value (sig) bernilai 7,576, terdapat pengaruh yang signifikan dari tata kelola terhadap implementasi kebijakan pengelolaan DAK SPDT sebesar 0,163, dimana nilai p-value (sig) bernilai 1,856.

Kata Kunci: Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, Tata Kelola Pemerintahan, Dana Alokasi Khusus Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal

ABSTRACT

AGUNG R. KURNIAWAN. *Implementation of The Special Allocation Fund Management Policy for Infrastructure of Rural Development Area (DAK SPDT) Year 2010 – 2012 at Situbondo Regency.*

Special Allocation Fund for Infrastructure of Rural Development Area (DAK SPDT) is one of the DAK field which aims to help disadvantaged areas, the need is to fund infrastructure and basic public services to accelerate the regional development. In practice, the Local Government Unit commissioned (SKPD) to manage DAK SPDT accordance with their field. Department of Transportation, Communication and Information is one of the SKPD that has an important role as ruling manager of controlling transport activity within DAK SPDT in Situbondo.

This study explores in depth at the factors that influence policy implementation on managing DAK SPDT base on several variabels such as: the competency of human resources, institutional, governance, and policy implementation DAK SPDT.

The analysis used in this study is a multiple linear regression analysis to measure how much variabels competency of human resources, institutional structure, and governance can explain the dependent variabel (Implementation DAK SPDT Policy). Hypothesis testing is done by T-test to try to find the effect of independent variabels on the dependent variabel partially. As for the independent variabels are tested simultaneously used the F-test. The research instrument that been used is a questionnaire with the sample of 100 respondents.

The coefficient of determination (R-square) obtained is equal to 0.804 (or by 80.4%) reflects the change in the variabel variation of the implementation of DAK SPDT policy management can be determined by all variabels simultaneously at 80.4%, and the remainder is equal to 19,6% is the determination of the other dimensions that are not included in this study. The results also show that there is significant influence of the competency of human resources to the implementation of management DAK SPDT policies worth 0.98, where the p-value (sig) worth 1,764, a significant influence on the implementation of institutional policies for the management of DAK SPDT .924 , where the p-value (sig) is worth 7.576, there is a significant influence on the implementation of governance policies for the management of DAK SPDT 0.163, where p-value (sig) worth 1,856.

Keywords : *Human Resources, Institutional, Governance, Special Allocation Fund for Disadvantaged Areas Infrastructure.*